



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan *Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku* Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RENSTRA BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RENSTRA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

RENSTRA BP3KP Maluku disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kelembagaan, dan pendanaan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi BP3KP Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan, serta berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya di lingkungan Balai.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA BP3KP Maluku Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*.



Ambon, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Maluku



Pither Pakabu, S.T., M.S.i.
NIP. 196912181996031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Potensi dan Permasalahan.....	11
I.2.1 Potensi	11
I.2.2 Permasalahan	13
I.2.3 Analisis SWOT	14
 BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	 16
II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	16
II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	19
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA	
KELEMBAGAAN	23
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	23
III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	23
III.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	24
III.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	26
III.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28
III.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal.....	30
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku.....	32

III.3 Kerangka Kelembagaan	34
III.3.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BP3KP Maluku.....	35
III.3.2 Struktur Organisasi	37
III.3.3 Sumber Daya Manusia.....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
IV.1 Target Kinerja	44
IV.2 Kerangka Pendanaan.....	48
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan	
LAMPIRAN II Metode Perhitungan	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Maluku	2
Gambar 2. Analisis SWOT	15
Gambar 3. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT	37
Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi UPT	38
Gambar 5. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Gender	40
Gambar 6. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Status Pegawai	41
Gambar 7. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Pendidikan	42
Gambar 8. Peta Jabatan Balai P3KP Maluku	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Bencana Alam yang Terjadi di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024	5
Tabel 2. Data <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Maluku Tahun 2024.....	6
Tabel 3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun Anggaran 2020 – 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku.....	9
Tabel 4. Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Maluku Tahun 2025-2029.....	44
Tabel 5. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Balai P3KP Maluku Tahun 2025-2029	48
Tabel 6. Kerangka Pendanaan Balai P3KP Maluku Tahun 2025-2029	Error! Bookmark not defined.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku (BP3KP Maluku) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan fungsi teknis operasional kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja yang ditetapkan. Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 menjadi tonggak penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan kedudukan BP3KP Maluku sebagai pelaksana teknis operasional kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai perumus kebijakan nasional, yang pelaksanaannya didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, termasuk BP3KP Maluku, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan wilayah kerja.

Wilayah kerja BP3KP Maluku mencakup seluruh Provinsi Maluku. Penetapan wilayah kerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan fokus,

Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan, serta Kota Ambon dan Kota Tual. Sebaran wilayah administrasi yang berada pada gugusan pulau-pulau tersebut menuntut penguatan koordinasi lintas pemerintah daerah, penajaman prioritas lokasi, serta pengelolaan tahapan pelaksanaan yang lebih cermat agar penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman dapat menjangkau wilayah secara efektif dan merata.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.862.626 jiwa, dengan persebaran yang sangat bervariasi antar kabupaten/kota. Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 440.848 jiwa, sedangkan Kabupaten Buru Selatan memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 80.842 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk antarwilayah juga menunjukkan perbedaan, dengan beberapa kabupaten mengalami pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika demografis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara proporsional dan berkeadilan.

Dari sisi kepadatan penduduk, Kota Ambon memiliki tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Maluku dengan 1.532,32 jiwa per km², sementara kabupaten kepulauan seperti Kepulauan Aru memiliki tingkat kepadatan yang sangat rendah sebesar 42,16 jiwa per km². Ketimpangan kepadatan penduduk ini berimplikasi pada perbedaan kebutuhan dan pendekatan penyediaan perumahan, baik di wilayah perkotaan yang cenderung padat maupun di wilayah

perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tersebar dan relatif terpencil.

Secara sosial dan budaya, masyarakat Maluku memiliki karakteristik sebagai masyarakat kepulauan dengan pola kehidupan yang banyak bergantung pada sumber daya laut, pesisir, dan pertanian. Pola bermukim masyarakat umumnya terbentuk dalam kelompok-kelompok permukiman yang berakar pada struktur desa atau negeri, dengan hubungan yang erat antara hunian dan mata pencaharian. Kondisi ini memengaruhi kebutuhan dan preferensi masyarakat terhadap hunian, sehingga penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Jenis hunian yang berkembang di Provinsi Maluku didominasi oleh rumah tapak, dengan sebagian wilayah memerlukan rumah khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah pesisir. Tantangan penyediaan hunian di wilayah kepulauan antara lain keterbatasan material bangunan, akses transportasi, serta kondisi geografis dan iklim yang memengaruhi proses konstruksi. Oleh karena itu, pendekatan penyediaan perumahan perlu disesuaikan dengan karakter wilayah dan kemampuan masyarakat setempat.

Provinsi Maluku juga merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi, antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan abrasi pantai. Dapat dilihat pada jumlah bencana alam yang terjadi Provinsi Maluku pada Tahun 2020 – 2024 yang disajikan pada Tabel 1 dimana kejadian bencana alam di Provinsi Maluku pada periode tersebut didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, dengan frekuensi tertinggi terjadi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon. Jenis bencana geologis seperti gempa bumi juga tercatat terjadi di sejumlah kabupaten, meskipun dengan frekuensi yang lebih rendah.

Tabel 1. Jumlah Bencana Alam yang Terjadi di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam (kali)									
	Gempa Bumi	Tsunami	Gempa Bumi & Tsunami	Letusan Gunung Api	Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Kebakaran Hutan & Lahan	Cuaca Ekstrem	Gelombang Pasang/Abrasi
Kab. Maluku Tengah	2	0	0	0	1	13	1	2	0	1
Kota Ambon	1	0	0	0	18	15	0	2	8	1
Kab. Seram Bagian Barat	2	0	0	0	4	30	1	3	4	1
Kab. Kepulauan Aru	1	0	0	0	0	4	0	0	4	1
Kab. Kepulauan Tanimbar	1	0	0	0	0	1	0	0	6	2
Kab. Seram Bagian Timur	2	0	0	0	0	6	1	1	4	4
Kab. Buru	0	0	0	0	2	10	0	3	4	1
Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1
Kab. Maluku Barat Daya	4	0	0	0	1	1	0	4	0	1
Kab. Buru Selatan	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Kota Tual	0	0	0	0	0	5	0	0	2	1

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kondisi kebencanaan tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas dan ketahanan hunian serta penataan kawasan permukiman. Penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman di Maluku perlu memperhatikan aspek keselamatan, ketahanan bangunan, dan mitigasi risiko bencana guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana alam.

Dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku sebagaimana diuraikan, tantangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman juga tercermin pada kondisi kebutuhan hunian masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan tersebut adalah *backlog* perumahan, baik *backlog* kepemilikan maupun *backlog* kualitas hunian di Provinsi Maluku.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2024, Provinsi Maluku memiliki 584.128 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.124 KK (11,32%) belum memiliki rumah sendiri (*backlog* kepemilikan), dan 101.588 KK (17,39%) tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan (*backlog* kualitas). Dengan

demikian, total *backlog* perumahan di Provinsi Maluku mencapai 167.712 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 2. Data *Backlog* Perumahan Provinsi Maluku Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan (KK)	<i>Backlog</i> Kualitas (KK)	Total <i>Backlog</i> Perumahan (KK)
1	Kab. Maluku Tengah	17.721	18.595	36.316
2	Kota Ambon	14.058	9.785	23.843
3	Kab. Seram Bagian Barat	5.893	15.195	21.088
4	Kab. Kepulauan Aru	4.417	12.201	16.618
5	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.528	8.573	14.101
6	Kab. Seram Bagian Timur	4.609	8.511	13.120
7	Kab. Buru	3.681	7.924	11.605
8	Kab. Maluku Tenggara	3.628	6.737	10.365
9	Kab. Maluku Barat Daya	2.558	6.186	8.744
10	Kab. Buru Selatan	2.340	4.768	7.108
11	Kota Tual	1.691	3.113	4.804
TOTAL		66.124	101.588	167.712

Sumber: DTSEN pada Dashboard myPKP

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, masih menjadi kebutuhan utama yang perlu didorong secara berkelanjutan.

Selain pemenuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku. Kawasan kumuh umumnya ditandai oleh kondisi hunian yang tidak layak, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta kualitas lingkungan permukiman yang belum memadai. Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029, capaian indikator penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10–15 ha tercatat sebesar 67,78% pada tahun 2024. Capaian tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan kawasan kumuh secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Dengan memperhatikan kondisi *backlog* perumahan, capaian akses hunian layak, kebutuhan penanganan kawasan kumuh, serta karakteristik wilayah kepulauan Provinsi Maluku, aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terutama mengarah pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan hunian bagi kelompok rentan dan terdampak bencana, perbaikan lingkungan permukiman, serta pemenuhan PSU permukiman. Masyarakat juga membutuhkan layanan informasi dan pendampingan program yang lebih mudah diakses, transparan, responsif, dan tepat sasaran, mulai dari tahap pendataan, verifikasi, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pemantauan hasil kegiatan.

Dalam lingkup kewenangan BP3KP Maluku, kondisi dan aspirasi tersebut perlu dijawab melalui penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, serta pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pelaksanaan intervensi perlu didukung oleh pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman, penajaman lokasi prioritas, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota, serta keterpaduan program agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan wilayah dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, dokumen perencanaan teknis, ketentuan penataan ruang, serta penetapan lokasi prioritas, agar intervensi yang dilakukan sesuai kewenangan, berbasis data, dan mendukung peningkatan kualitas hunian serta lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman pada periode sebelumnya, yaitu Tahun 2020–2024, dilaksanakan dalam kerangka kebijakan nasional yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pelaksanaan teknis operasional dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan (BP2P) Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah. Pada periode tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi BP2P Maluku berfokus pada penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas hunian sesuai dengan kebijakan kementerian yang berlaku, dengan cakupan wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan periode perencanaan saat ini.

Pada periode 2020–2024, BP2P Maluku melaksanakan program penyediaan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cakupan wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan periode perencanaan saat ini. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan rumah baru, rumah khusus, rumah susun, serta peningkatan kualitas rumah swadaya.

Selain penyediaan perumahan secara fisik, BP2P Maluku juga melaksanakan kegiatan bantuan pembiayaan dan fasilitasi perumahan untuk mendukung keterjangkauan hunian bagi masyarakat. Kegiatan ini mencakup fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta dukungan fasilitasi penghunian dan perizinan.

Tabel 3. Perbandingan Target dan Capaian Tahun Anggaran 2020 – 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Perbandingan Capaian Kinerja									
			TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023		TA. 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	5520	5519	5850	1850	3230	3167	2811	2778	2170	2024
	Jumlah Fasilitas Pembangunan Baru Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata	Unit	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah Fasilitas Pengembangan & Peningkatan Kualitas Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata	Unit	Na	Na	170	170	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	MYC	MYC	176	176	44	44	21	21	32	53
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	11	11	Na	Na	12	12	5	5	2	2
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	12	12	71	71	2	2	50	50	209	49
	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	Na	Na	Na	Na	Na	Na	30	30	Na	Na
	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	Unit	Na	Na	105	105	50	50	50	50	100	-
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Meningkatnya efektivitasi dan efisiensi tata kelola, kesekretariatan DJP	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Berdasarkan Tabel 3, secara umum capaian kinerja periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator program perumahan dan kawasan permukiman dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, meskipun terdapat variasi capaian pada beberapa kegiatan tertentu. Fluktuasi target dan realisasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, ketersediaan anggaran, serta kondisi pelaksanaan di wilayah kepulauan. Capaian kinerja ini menjadi gambaran pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman sebelum berlakunya struktur kelembagaan baru.

Seiring dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penataan organisasi unit pelaksana teknis, terjadi perubahan kelembagaan yang memperkuat mandat dan menyesuaikan ruang lingkup tugas, termasuk integrasi aspek kawasan permukiman secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, capaian periode 2020–2024 digunakan sebagai referensi kontekstual dalam perumusan arah perencanaan BP3KP Maluku pada periode 2025–2029.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Provinsi Maluku memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BP3KP Maluku berperan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, melalui sinergi perencanaan, pelaksanaan program, serta pemanfaatan hasil pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah Maluku secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, sosial, dan lingkungan Provinsi Maluku, serta tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Bab ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta

merumuskan arah perencanaan BP3KP Maluku pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku disusun dengan mengacu pada kondisi umum wilayah, capaian pembangunan, serta data sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman. Analisis ini mempertimbangkan karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan, sebaran kebutuhan hunian layak, kondisi kawasan permukiman, serta peran BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Maluku.

Uraian potensi dan permasalahan ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis SWOT dan perumusan isu strategis BP3KP Maluku periode Tahun 2025–2029.

I.2.1 Potensi

1. Dukungan kebijakan dan kelembagaan nasional

Dukungan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi potensi penting dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku. Keberadaan BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat pelaksanaan program di daerah, khususnya dalam penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas rumah, pengembangan kawasan permukiman, dan penanganan permukiman kumuh.

2. Program strategis nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman

Program strategis nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi peluang untuk mendukung pemenuhan hunian layak dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Provinsi Maluku. Program tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan perumahan, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana dasar permukiman, serta pengurangan kawasan kumuh secara bertahap.

3. Dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan data sektoral

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, terutama melalui integrasi perencanaan, kesiapan lokasi, fasilitasi pelaksanaan, dan keberlanjutan hasil pembangunan. Selain itu, tersedianya data sektoral mengenai *backlog* perumahan, RTLH, hunian layak, dan kawasan kumuh menjadi potensi dalam mendukung perencanaan yang lebih berbasis data dan tepat sasaran.

4. Potensi wilayah dan sosial ekonomi

Karakteristik wilayah Provinsi Maluku dengan basis kegiatan ekonomi kelautan, perikanan, pertanian, serta pusat-pusat aktivitas ekonomi lokal menjadi potensi dalam pengembangan dan penataan kawasan permukiman yang mendukung fungsi hunian dan produktivitas masyarakat.

5. Modal sosial masyarakat

Nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat di masyarakat menjadi potensi dalam mendukung pelaksanaan program berbasis partisipasi masyarakat. Modal sosial ini dapat memperkuat kegiatan peningkatan kualitas rumah, penataan lingkungan permukiman, serta pemeliharaan hasil pembangunan agar lebih berkelanjutan.

I.2.2 Permasalahan

1. Tingginya *backlog* perumahan dan kebutuhan peningkatan kualitas hunian

Permasalahan utama bidang perumahan di Provinsi Maluku adalah masih tingginya kebutuhan pemenuhan hunian layak. Berdasarkan data pada *Dashboard* Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki *backlog* kepemilikan sebesar 10,22% dan *backlog* RTLH sebesar 24,70% dari 608.903 keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perumahan di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kepemilikan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, pemenuhan hunian layak perlu diarahkan secara tepat sasaran, berbasis data, dan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan.

2. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan terpadu

Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029, capaian penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10–15 ha pada tahun 2024 tercatat sebesar 67,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh masih perlu dilanjutkan melalui peningkatan kualitas hunian, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penataan lingkungan permukiman secara terpadu dan sesuai kewenangan.

3. Tantangan pelaksanaan program pada wilayah kepulauan

Karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Sebaran wilayah antarpulau berdampak pada kebutuhan mobilisasi material, tenaga kerja, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan yang lebih kompleks.

Kondisi ini memerlukan perencanaan yang lebih cermat, penentuan lokasi prioritas yang tepat, serta dukungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.

4. Perlunya penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko

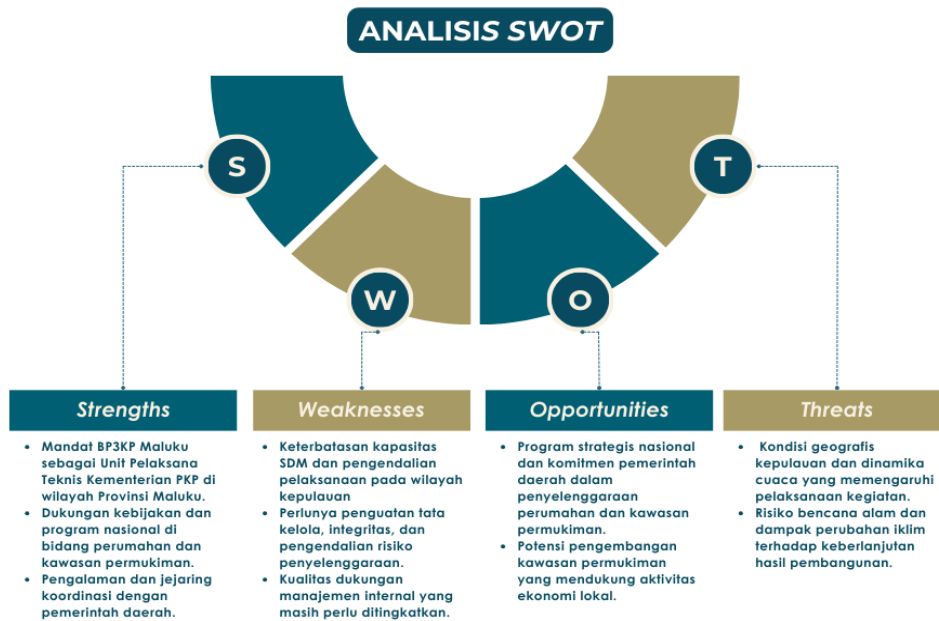
Penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman memerlukan tata kelola yang kuat agar pelaksanaan kegiatan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko perlu terus dilakukan, terutama dalam aspek validasi data, penentuan sasaran, pengawasan mutu, pengendalian administrasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

5. Perlunya penguatan dukungan manajemen internal

Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Maluku memerlukan dukungan manajemen internal yang memadai. Dukungan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya organisasi, administrasi kegiatan, data dan informasi, pelaporan, serta koordinasi program. Penguatan dukungan manajemen internal diperlukan agar pelaksanaan program teknis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

I.2.3 Analisis SWOT

Potensi dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku dihadapkan pada dinamika internal dan eksternal yang perlu dikelola secara strategis. Oleh karena itu, dilakukan analisis SWOT melalui tahapan identifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan.



Gambar 2. Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT selanjutnya disintesis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mencerminkan tantangan utama yang perlu dijawab BP3KP Maluku dalam periode perencanaan 2025–2029. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Kebutuhan pemenuhan hunian layak masih tinggi, ditandai dengan *backlog* kepemilikan dan *backlog* kualitas hunian yang signifikan di Provinsi Maluku;
2. Permukiman kumuh masih memerlukan penanganan yang terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional serta karakteristik wilayah kepulauan di Provinsi Maluku;
3. Perlunya penguatan tata kelola, integritas, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku; dan
4. Perlunya penguatan kualitas dukungan manajemen internal BP3KP Maluku untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai di Provinsi Maluku.

Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan Balai, sasaran program, dan arah kebijakan BP3KP Maluku.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelaraskan arah pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman dengan visi Presiden serta menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden periode 2025–2029, yang dimaknai sebagai upaya pembangunan nasional yang memerlukan kontribusi seluruh komponen bangsa dengan berlandaskan fondasi pembangunan yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga mampu mewujudkan Indonesia setara negara maju pada tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan misi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam delapan Asta Cita. Delapan Asta Cita ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar selaras dengan prioritas nasional.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung utama Asta Cita ke-6, yaitu *“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”*. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-3 dan Asta Cita ke-8 dalam pelaksanaan kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode 2025 – 2029. Berikut merupakan Tujuan Kementerian:

1. Tujuan pertama adalah **Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.**
2. Tujuan kedua adalah **Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku menetapkan tujuan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Maluku. Perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak, serta isu strategis daerah yang diidentifikasi melalui analisis potensi dan permasalahan pada Bab sebelumnya. Dengan demikian, tujuan Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. **Mendukung peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Maluku.**

Tujuan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaannya, Balai berperan melalui penyediaan dan fasilitasi program perumahan, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, dukungan penanganan kawasan permukiman sesuai kewenangan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, pelaksanaan program perlu dilakukan secara tepat sasaran, terpadu, efisien, dan berkelanjutan.

2. **Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku.**

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola internal Balai dalam mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pengelolaan data, administrasi, keuangan, barang milik negara, serta layanan dukungan manajemen lainnya. Dengan tata kelola yang semakin tertib, efektif, dan akuntabel, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.

II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *outcome/impact* dari pelaksanaan program pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, Kementerian menjabarkan satu misi dan dua tujuan ke dalam dua Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 2025–2029.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**; dan
2. Sasaran Strategis (SS) 2, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk BP3KP Maluku sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Dalam kerangka tersebut, Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 terdiri atas empat sasaran program sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Hunian Layak**

Sasaran program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan

berkelanjutan melalui fasilitasi penyediaan rumah layak huni serta peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman.

2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh

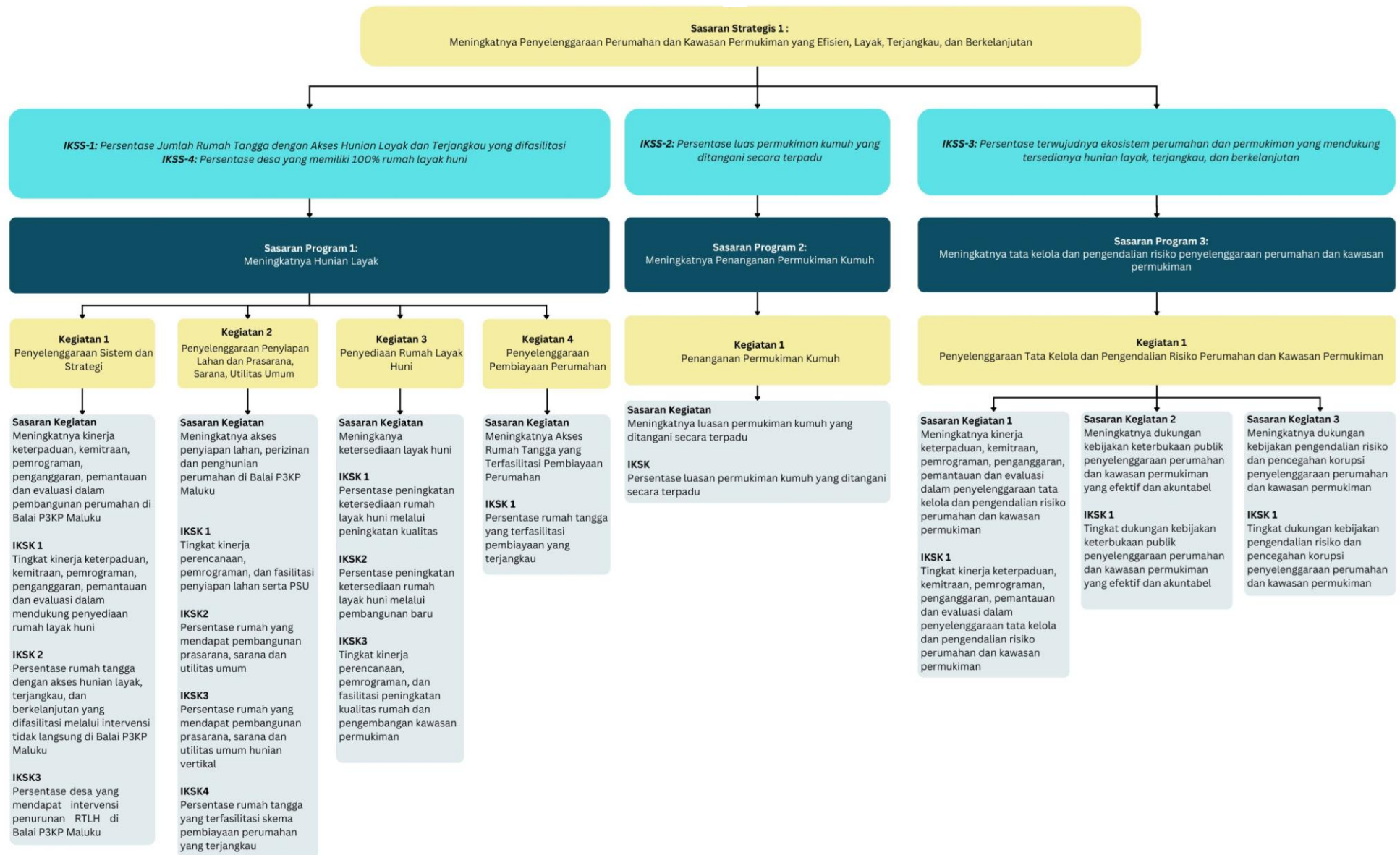
Sasaran program ini ditujukan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh secara terpadu melalui fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan wilayah.

3. Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

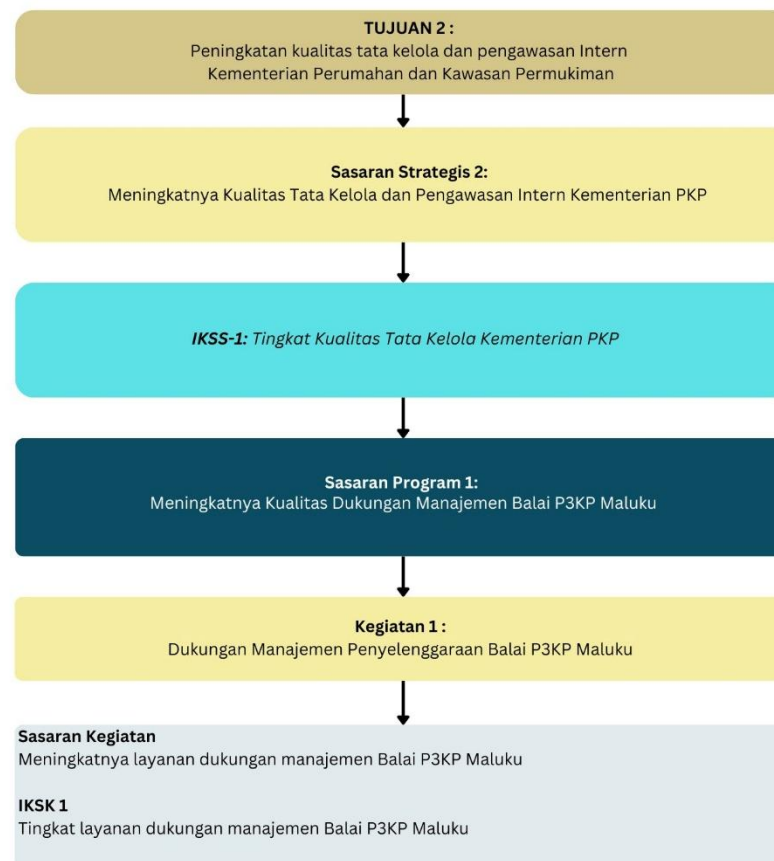
Sasaran program ini difokuskan pada penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, termasuk pengendalian risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen

Sasaran program ini diarahkan untuk memperkuat dukungan manajemen internal Balai agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.



Gambar 3. Pohon Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku



Gambar 4. Pohon Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan,** dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a. Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - b. Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
- 2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif,** dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - b. Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan

- c. Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- 3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu**, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran).
- 4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak**, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - c. Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - e. Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - f. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

III.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- 1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
 - a. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;

- c. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - d. Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal**, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (*mixed-use*, TOD).
- 3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)**, dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- 4. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
- a. Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - b. Peningkatan kapasitas *stakeholder* dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholder* terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - e. Penguatan kelembagaan.
- 5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.

6. **Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR**, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank.
7. **Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital**, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
8. **Percepatan penghunian**, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

III.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

1. **Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan**, dengan strategi:
 - a. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - d. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2. **Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif**, dengan strategi:
 - a. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - b. Pengembangan skema tabungan berencana;

- c. Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
- d. Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
- e. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
- f. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:

- a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
- b. Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
- c. Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- e. Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- f. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- g. Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.

4. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- a. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan

- masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- b. Peningkatan kapasitas *stakeholder* dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi antar *stakeholder* terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - e. Penguatan kelembagaan.

III.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat,** dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- 2. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik,** dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- 3. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar**

FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema loan/hibah multilateral, dan program IGHP;
- b. Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
- c. Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan; dan
- d. Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.

4. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan SE Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Meningkatkan kemitraan dengan *stakeholder* lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan *stakeholder* lain dan Pengaturan Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:

- a. *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
- b. *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
- c. *Compliance*, pencaanangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), Sistem

- Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. *Financing*, kerjasama investasi asing, *housing queue*, FLPP, IGAHP (*Indonesia Green Affordable Housing Program*), skema *off-take guarantee*; dan
 - e. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

III.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:

- a. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
- b. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.

2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:

- a. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
- b. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:

- a. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;
- b. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan

- c. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- 4. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:**
- a. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan
 - b. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- 5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:**
- a. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- 6. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:**
- a. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - b. Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 7. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:**
- a. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - b. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- 8. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:**
- a. Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - b. Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-Procurement* untuk efisiensi dan transparansi.

9. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:

- a. Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
- b. Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.

10. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:

- a. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
- b. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Arah kebijakan dan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku periode 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta arah kebijakan unit organisasi yang menekankan penguatan peran setiap unit dalam mendukung pencapaian tujuan kementerian. Arah kebijakan dan strategi ini dilaksanakan oleh BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Provinsi Maluku melalui program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan, dengan mempertimbangkan sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Arah kebijakan dan strategi BP3KP Maluku Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku

Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- i. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah, disertai pengendalian mutu, pemantauan, dan evaluasi agar memenuhi standar kelayakan huni serta tepat sasaran.
- ii. Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan, penghunian, serta pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum agar penyelenggaraan perumahan dapat berjalan lebih siap, layak, dan terpadu.
- iii. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui pengembangan kawasan permukiman dan penanganan permukiman kumuh secara terpadu sesuai kewenangan, kesiapan lokasi, dan kebutuhan wilayah.
- iv. Mendukung penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial melalui pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan, ketentuan teknis, dan kewenangan Balai.
- v. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman melalui pengawasan, pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara tertib dan akuntabel
- vi. Memperkuat keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
- vii. Mendukung penyusunan program dan rencana teknis melalui pemutakhiran data dan informasi, penyiapan rekomendasi, serta sinkronisasi kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- viii. Mendukung fasilitasi pembiayaan perumahan melalui koordinasi dan pendataan dukungan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.

- ix. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra CSR dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.
- x. Meningkatkan fasilitasi bina usaha, perlindungan konsumen perumahan, serta forum perumahan dan kawasan permukiman melalui koordinasi dan pendampingan sesuai tugas dan fungsi Balai.
- xi. Memperkuat tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemantauan dan pendampingan tata kelola, penguatan keterbukaan publik, pembangunan dan penerapan Zona Integritas, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan.

2) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, dengan strategi meningkatkan kualitas dukungan manajemen melalui Dukungan Manajemen BP3KP Maluku, meliputi layanan perkantoran, layanan umum, layanan sarana internal, layanan BMN, pengelolaan data dan informasi Balai untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan tertib, efisien, dan akuntabel.

III.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Penataan kerangka kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam pengaturan kedudukan, struktur organisasi, tata kerja, serta hubungan koordinasi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Balai menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan kementerian serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.3.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BP3KP Maluku

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 menandai penguatan peran negara dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, yang menegaskan kedudukan BP3KP sebagai UPT pelaksana teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BP3KP Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas teknis penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan, BP3KP Maluku secara fungsional dan teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, guna menjamin keterpaduan kebijakan dan keselarasan pelaksanaan program di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP Maluku mempunyai tugas

melaksanakan: penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

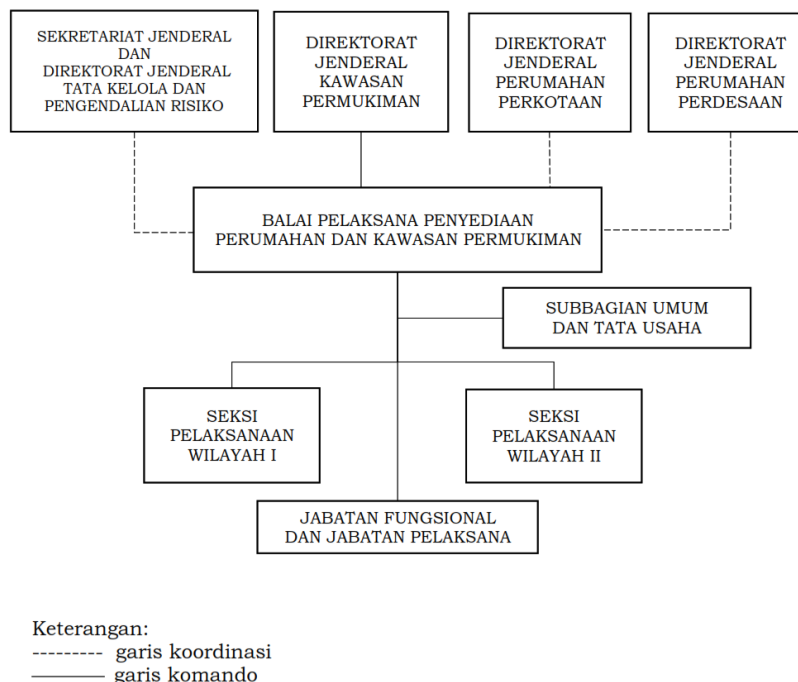
1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan serta pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum, dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman nasional dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan Provinsi Maluku.

III.3.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku terdiri atas unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi tersebut disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, serta koordinasi dan pengendalian kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai.



Gambar 5. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

Bagan garis koordinasi dan garis komando Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan kedudukan, pola pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi UPT di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT memperoleh pembinaan dari Sekretariat Jenderal, meliputi bidang tata usaha, umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan.

Selain itu, UPT juga mendapatkan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yang mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, penerapan system manajemen risiko, serta pengendalian antikorupsi dan penyuapan.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan perkotaan, UPT secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.



Gambar 6. Bagan Susunan Organisasi UPT

Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan struktur organisasi dan hubungan kerja antar unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan tersebut menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan UPT. Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum Balai.

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial serta melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi pelaksanaan wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

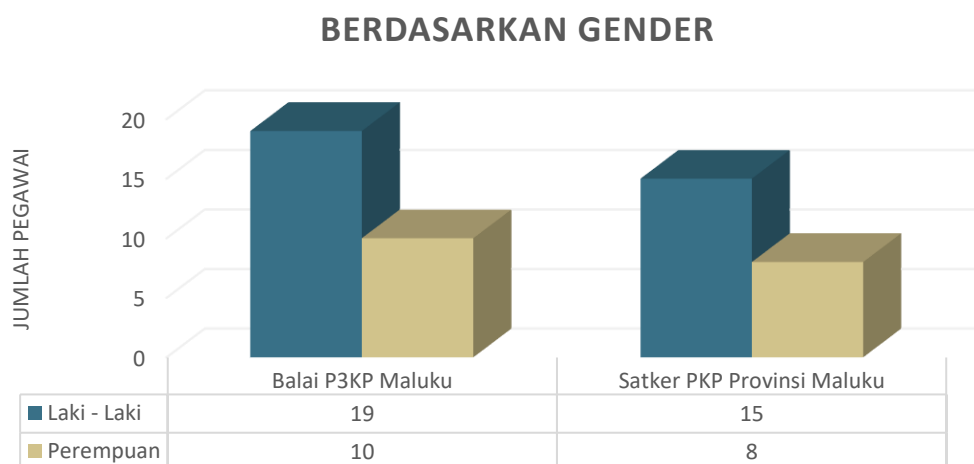
d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

III.3.3 Sumber Daya Manusia

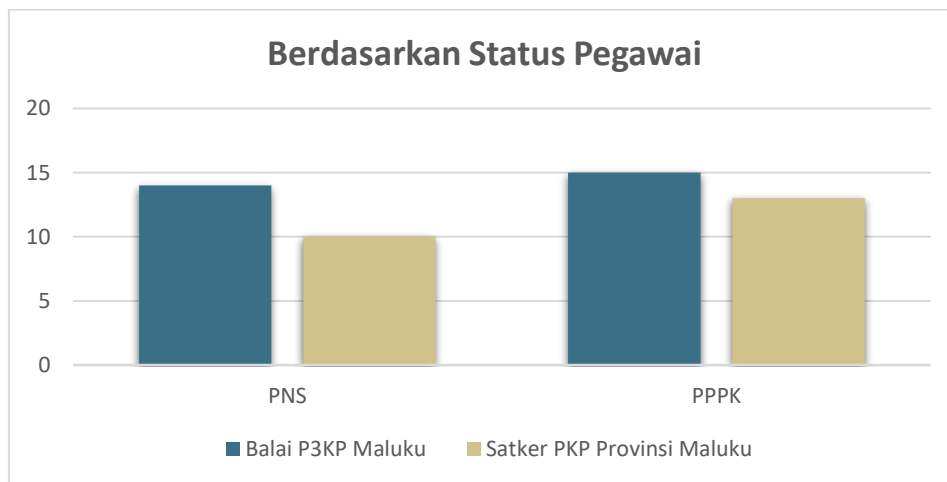
Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Kompleksitas tugas yang mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta dukungan tata kelola menuntut ketersediaan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kompetensi.

Dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku yang berciri kepulauan dan memiliki sebaran lokasi kegiatan yang luas, kebutuhan SDM tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, tetapi juga kesesuaian jabatan dan kapasitas teknis dalam mendukung pelaksanaan program secara efektif dan akuntabel.



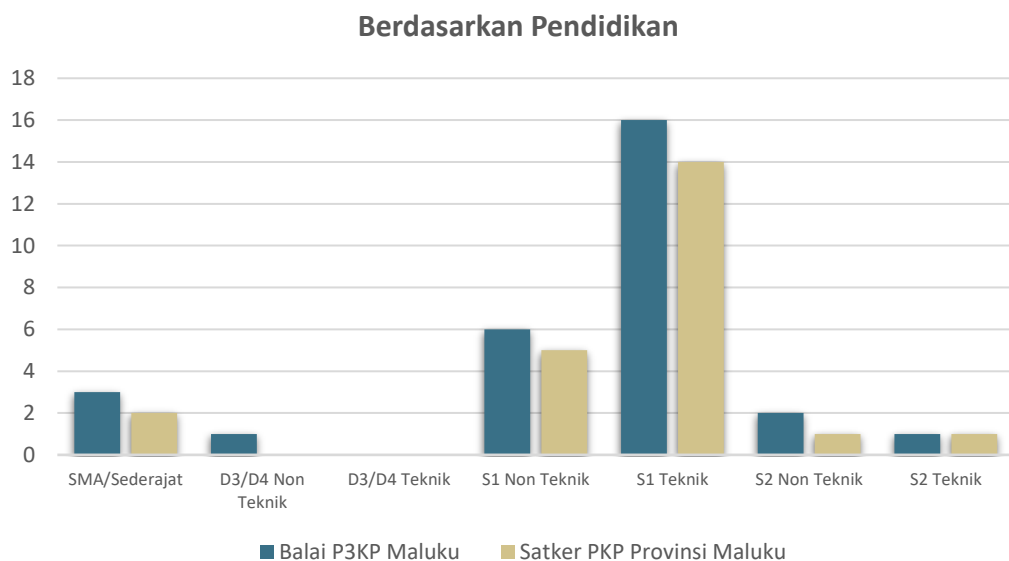
Gambar 7. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Gender

Berdasarkan kondisi tahun 2025, jumlah SDM BP3KP Maluku sebanyak 52 orang terdiri atas pegawai laki-laki 34 orang (19 Balai; 15 Satker) dan perempuan 18 orang (10 Balai; 8 Satker). Komposisi ini menunjukkan bahwa SDM BP3KP Maluku didominasi oleh pegawai laki-laki, dengan sebaran antara Balai dan Satker yang relatif proporsional.



Gambar 8. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Status Pegawai

Berdasarkan status kepegawaian, total SDM sebanyak 52 orang terdiri atas PNS 24 orang (14 Balai; 10 Satker) dengan 12 di antaranya masih berstatus CPNS, serta PPPK 28 orang (15 Balai; 13 Satker). Komposisi ini menunjukkan dukungan pelaksanaan tugas Balai relatif seimbang antara PNS/CPNS dan PPPK, dengan proporsi PPPK sedikit lebih dominan. Keberadaan CPNS mengindikasikan proses regenerasi aparatur yang akan memperkuat kesinambungan organisasi dalam jangka menengah dan panjang.



Gambar 9. Klasifikasi SDM BP3KP Maluku Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari total 52 orang pegawai, jenjang pendidikan didominasi oleh S1 Teknik sebanyak 30 orang (16 Balai; 14 Satker), diikuti S1 Non Teknik 11 orang (6 Balai; 5 Satker) dan SMA/ sederajat 5 orang (3 Balai; 2 Satker). Selebihnya terdiri atas S2 Non Teknik 3 orang (2 Balai; 1 Satker), S2 Teknik 2 orang (1 Balai; 1 Satker), serta D3/D4 Non Teknik 1 orang (1 Balai; 0 Satker). Komposisi ini menunjukkan bahwa SDM didominasi lulusan sarjana, terutama bidang teknik, yang mendukung pelaksanaan fungsi teknis operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Gambaran kondisi eksisting SDM menunjukkan bahwa BP3KP Maluku telah memiliki dukungan aparatur yang secara umum mampu menjalankan fungsi operasional organisasi, khususnya pada aspek teknis pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Namun demikian, untuk memastikan bahwa komposisi SDM tersebut benar-benar selaras dengan kebutuhan struktur organisasi dan beban kerja yang diemban, diperlukan analisis yang lebih terukur mengenai kebutuhan jabatan secara ideal.

Peta jabatan disusun sebagai instrumen perencanaan kebutuhan ASN yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang

diperlukan sesuai struktur organisasi dan beban kerja. Melalui peta jabatan, organisasi dapat mengetahui kebutuhan ideal pegawai, kondisi eksisting pegawai saat ini, serta formasi atau selisih kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dengan demikian, peta jabatan menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan ASN dan penataan organisasi agar lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan peta jabatan BP3KP Maluku, kebutuhan ideal SDM (K) berjumlah 72 orang, sedangkan jumlah pegawai eksisting (B) saat ini sebanyak 52 orang. Dengan demikian, terdapat kebutuhan formasi (F) atau gap sebanyak 21 orang. Selisih tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan organisasi masih memerlukan penguatan jumlah dan jenis jabatan dalam mendukung pencapaian sasaran Balai periode 2025–2029.

Peta Jabatan di BP3KP Maluku

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
1 1 0			
Kelompok Jabatan Fungsional			
	K	B	F
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	10	6	4
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	2	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	1	1	0
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	13	10	3
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	1	1	0
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	5	-3
JF Asisparta Ahli Pertama	4	2	2
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3	2	1
JP Pengadministrasian Perkantoran	4	3	1
JP Penata Layanan Operasional	3	1	2
JP Operator Layanan Operasional	1	0	1
JP Perencana Ahli Pertama	1	1	0
JP Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	0	0	0
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	45	34	11
Kasubag. TU			
	K	B	F
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	1	0
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0
JF Asisparta Ahli Pertama	4	2	2
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3	1	2
JP Penata Layanan Operasional	3	2	1
JP Operator Layanan Operasional	1	1	0
JP Pengadministrasian Perkantoran	4	1	3
JP Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	18	9	9
Seksi Pelaksanaan Wilayah I			
	K	B	F
Kasi Pelaksanaan Wilayah I	1	1	0
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	2	2	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1	1	0
JF Penata Laksana Penyelesaian Lingkungan	1	0	1
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	4	4	1
Seksi Pelaksanaan Wilayah II			
	K	B	F
Kasi Pelaksanaan Wilayah II	1	1	0
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	1	1	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1	2	-1
JF Penata Laksana Penyelesaian Lingkungan	1	0	1
Jumlah Terpenuhi/Dibutuhkan	4	4	0

No	Jumlah	Perencanaan Kebutuhan
1	72	(K) Kebutuhan Ideal
2	52	(B) Eksisting/ Pegawai saat ini
3	21	(F) Formasi

Gambar 10. Peta Jabatan Balai P3KP Maluku



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan penjabaran terukur atas Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Target ini memuat hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, serta Indikator Kinerja Kegiatan selama periode Tahun 2025–2029 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku.

Penyajian target kinerja dilakukan melalui rekapitulasi capaian lima tahunan sebagai gambaran keseluruhan target selama periode Renstra BP3KP Maluku Tahun 2025 - 2029, serta rincian target tahunan per indikator untuk menunjukkan tahapan dan distribusi pencapaian dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Setiap indikator disertai satuan pengukuran yang jelas, sehingga ketercapaian outcome pada tingkat Sasaran Program dan output pada tingkat Sasaran Kegiatan dapat diukur secara objektif dan terarah.

Rincian target tahunan berperan sebagai dasar pengendalian, yang memungkinkan penilaian kemajuan capaian indikator secara terukur dari tahun ke tahun. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil sampai akhir periode Renstra.

Tabel 4. Rekapitulasi Target Kinerja Balai P3KP Maluku Tahun 2025-2029

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN	TARGET 2025 - 2029
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		TARGET 2025 - 2029	
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	5	Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Dokumen
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	2	Laporan
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	4	Laporan
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Kegiatan
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	Dokumen
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	3	Laporan
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	8	Laporan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	-	Unit
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-	Unit
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	3	Dokumen
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	-	Dokumen
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	-	Dokumen
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN			TARGET 2025 - 2029
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah unit rumah swadaya	16.510	Unit
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	3.780	Unit
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	192	Unit
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	4	Laporan
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	2	Laporan
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Laporan
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-	Rekomendasi Kebijakan
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-	Laporan
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-	Laporan
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	4	Rekomendasi Kebijakan
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh			
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	41	Hektar
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		TARGET 2025 - 2029	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4	Laporan
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	5	Rekomendasi Kebijakan
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	5	Rekomendasi Kebijakan
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	4	Rekomendasi Kebijakan
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku			
OUTPUT KEGIATAN:			
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	10	Layanan
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	10	Layanan
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	8	Layanan
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	Layanan
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	8	Layanan
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	10	Layanan
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	4	Layanan
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	Layanan
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	4	Layanan
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4	Layanan
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	8	Layanan

IV.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan bagian integral dari perencanaan kinerja yang menggambarkan strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Tahun 2025–2029. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pelaksanaan program, tahapan kegiatan, serta kebutuhan riil dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Kerangka pendanaan disajikan dalam bentuk rekapitulasi kebutuhan anggaran lima tahunan dan rincian alokasi tahunan untuk setiap program dan kegiatan. Penyajian ini menunjukkan keterkaitan antara target kinerja dan dukungan pendanaan yang diperlukan, sehingga perencanaan anggaran dapat selaras dengan tahapan pencapaian target.

Tabel 5. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Balai P3KP Maluku Tahun 2025-2029

PROGRAM / SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	2025 – 2029 (Rp Ribu)
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Sasaran Program: Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	3.452.748,55
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	650.469,21
Penyediaan Rumah Layak Huni	2.536.402.116,71
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	325.186,61
Sasaran Program: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	90.400.000,00
Sasaran Program: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.589.891,00
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	347.527.294,47

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029 (Rp Ribu)
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak		
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	917.164,29
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	303.507,50
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	107.316,55
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	141.484,69
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	319.468,00
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	146.270,00
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	693.731,43
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	823.806,08
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	-
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	-
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	281.924,39
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	-
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	-
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	368.544,82

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029 (Rp Ribu)
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah unit rumah swadaya	430.064.400,00
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	1.725.346.422,75
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	375.771.891,00
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	384.804,15
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	11.431,01
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	-
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	-
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	303.507,50
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	4.519.660,29
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	325.186,61
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh		
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	90.400.000,00
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		2025 - 2029 (Rp Ribu)
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	352.600,00
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	974.608,00
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	1.218.458,00
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1.044.225,00
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku		
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku		
OUTPUT KEGIATAN:		
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	340.534.614,80
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	656.373,78
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	901.850,86
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	802.126,97
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	2.921.844,79
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	71.541,05
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	325.186,61
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	121.403,00
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	325.186,61
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	867.166,00

Sumber pendanaan kegiatan BP3KP Maluku berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung oleh sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerangka pendanaan disusun secara indikatif dan akan dijabarkan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai. Dokumen ini merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta wilayah kerja Balai P3KP Maluku dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan Balai selama periode rencana strategis. Melalui dokumen ini, diharapkan terdapat keterpaduan antara arah kebijakan, pelaksanaan kegiatan, serta dukungan kelembagaan dan pendanaan, sehingga pelaksanaan tugas Balai dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Dalam pelaksanaannya, Rencana strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta dokumen pelaporan kinerja Balai. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengedepankan sinergi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana strategis dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan pengendalian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar penyesuaian kebijakan apabila diperlukan, guna memastikan pelaksanaan tugas Balai tetap relevan dengan dinamika lingkungan strategis.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tahun 2025–2029 ini, diharapkan

seluruh jajaran Balai memiliki kesamaan arah dan komitmen dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Rencana Strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



MATRIKS KINERJA & PENDANAAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKUMAN MALUKU

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS 1 :															
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	200.000	210.800	222.183	234.181	917.164
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	2	-	-	-	-	2	107.317	-	-	-	-	107.317
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	319.468	-	-	-	-	319.468
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	-	-	-	-	3	146.270	-	-	-	-	146.270
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	160.000	168.640	177.747	187.345	693.731
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	2	2	2	2	8	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana. Sarana. Utilitas Umum															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	89.078	93.888	98.958	281.924
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	62	4.112	4.112	4.112	4.112	16.510	2.108.000	99.541.240	104.506.480	109.471.720	114.436.960	430.064.400
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	945	945	945	945	3.780	-	407.242.671	419.439.783	439.367.917	459.296.052	1.725.346.423
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	44	44	44	44	192	32.000.000	82.831.091	82.525.200	87.313.600	91.102.000	375.771.891
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.750	93.543	98.594	103.918	384.804
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2	11.431	-	-	-	-	11.431
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.042.400	1.098.690	1.158.019	1.220.552	4.519.660
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM:																
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	21	-	-	-	20	41,00	42.000.000	-	-	-	48.400.000	90.400.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan															
SASARAN PROGRAM:																
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyruapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																
SASARAN STRATEGIS 2:																
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN PROGRAM:																
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku																
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku																
SASARAN KEGIATAN:																
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	26.605.436	72.835.284	76.477.048	80.300.901	84.315.946	340.534.615
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	43.474	142.200	149.310	156.776	164.614	656.374
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	208.000	219.232	231.071	243.548	901.851
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	185.000	194.990	205.519	216.618	802.127
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	62.654	663.366	696.534	731.361	767.929	2.921.845
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	16.500	17.391	18.330	19.320	71.541
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
		10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	28.000	29.512	31.106	32.785	121.403
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	200.000	210.800	222.184	234.182	867.166

METODE PERHITUNGAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKUMAN MALUKU

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		kawasan permukiman	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan		
		OK 5 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: - kegiatan 2029: - kegiatan 2026: - kegiatan 2028: - kegiatan Total : 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: - rekomendasi kebijakan 2029: - rekomendasi kebijakan 2026: - rekomendasi kebijakan 2028: - rekomendasi kebijakan Total : - rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: - dokumen 2029: - dokumen 2026: - dokumen 2028: - dokumen Total : - dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman,	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan		penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan				
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total : 8 laporan			Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2:Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum										
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit			Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit			Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
			Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)						
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: - dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen			Non Kumulatif	Internal
			OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: - dokumen 2029: - dokumen 2026: - dokumen 2028: - dokumen Total : - dokumen			Non Kumulatif	Internal
			OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: - dokumen 2029: - dokumen 2026: - dokumen 2028: - dokumen Total : - dokumen			Non Kumulatif	Internal
			OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan			Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni									

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan, Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 62 unit 2027: 4.112 unit 2029: 4.112 unit 2026: 4.112 unit 2028: 4.112 unit Total : 16.510 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan, Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 945 unit 2029: 945 unit 2026: 945 unit 2028: 945 unit Total : 3.780 unit	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan, Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 16 unit 2027: 44 unit 2029: 44 unit 2026: 44 unit 2028: 44 unit Total :192 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan	OK 4 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	kawasan permukiman		Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan		
		OK 5 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : - laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: - rekomendasi kebijakan 2029: - rekomendasi kebijakan 2026: - rekomendasi kebijakan 2028: - rekomendasi kebijakan Total : - rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : - laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		kualitas perumahan perdesaan	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : - laporan		
		OK 10 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan					
SK 1 Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Pendanaan dilaksanakan)	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 21 Ha 2027: - Ha 2029: 20 Ha 2026: - Ha 2028: - Ha Total: 41 Ha		
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1 Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
SK 1 Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 1 Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1 Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
SK 1 Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan	IKSK 1 Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan	OK 1 Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		
		OK 2 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 2 rekomendasi kebijakan 2029: 2 rekomendasi kebijakan 2026: 2 rekomendasi kebijakan 2028: 2 rekomendasi kebijakan Total : 9 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS 2:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
Kegiatan 1:					
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 8 layanan		
		OK 4 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: - layanan 2029: - layanan 2026: - layanan 2028: - layanan Total : - layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi(Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Perumahan Perdesaan)	Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: - layanan 2029: - layanan 2026: - layanan 2028: - layanan Total : - layanan		
		OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

